

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS  
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN**

---

**NOTA DINAS**

Nomor: TAN.03.01/55.1/DII.M.EKON.03/04/2022

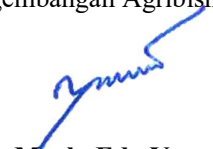
Kepada Yth. : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dari  
: Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022  
Tanggal : 8 April 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tembusan : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis

---

Menindaklanjuti nota dinas Bapak Kepala Biro Perencanaan Nomor AK.3.1-101/SET.M.EKON.01/04/2022 Tanggal 11 April 2022, dengan hormat kami sampaikan laporan kinerja Triwulan I tahun 2022 Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan

  
**Moch. Edy Yusuf**  
NIP 19700217 198912 1 001

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022**  
**Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan**

**A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022**

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Triwulan I Tahun 2022**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022 & Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
<i>Perspektif: Stakeholder</i>					
1.	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Agribisnis Perkebunan yang berkualitas	1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor Perkebunan	1,0 – 1,5%	-0.24	-24
		1.2. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat	105	133,43	127
<i>Perspektif: Internal Business Process</i>					
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Efektif	2.1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Baik (3 dari 4)	N/A	N/A
		2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	75% & 20%	20%	100*
<i>Perspektif: Learning and Growth</i>					
3.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis	3.1. Persentase ASN Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Memenuhi	70% & 20%	22%	110**

	Perkebunan yang Baik	Ketentuan Jam Pelajaran (JP) ASN			
		3.2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan	90% & 30%	44,87	149,57***

**Keterangan:**

- \* = Capaian Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan 100% dibandingkan target Triwulan I Tahun 2022 sebesar 20%.
- \*\* = Capaian Persentase ASN Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Memenuhi Ketentuan Jam Pelajaran (JP) ASN 100% dibandingkan target Triwulan I Tahun 2022 sebesar 20%.
- \*\*\* = Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan dibandingkan target Triwulan I Tahun 2022 sebesar 30%.

Kinerja Asisten Pengembangan Agribisnis Perkebunan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

**1 Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Agribisnis Perkebunan yang berkualitas**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Agribisnis Perkebunan yang berkualitas

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor Perkebunan
2. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1 Pertumbuhan Latar Belakang**

**Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor Perkebunan**

PDB Sub Sektor perkebunan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di sektor Perkebunan yang dihitung dengan pendekatan produksi. Pertumbuhan PDB Sub Sektor perkebunan menunjukkan perubahan PDB Sub Sektor Perkebunan atas dasar harga konstan (ADHK) yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu yaitu tahun 2010 sebagai acuan.

Pertumbuhan PDB Sub Sektor perkebunan menjadi salah satu indikator kinerja Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan digunakan sebagai indikator yang menggambarkan capaian Pemerintah dalam melakukan upaya peningkatan nilai tambah barang dan jasa Sub Sektor Perkebunan. Hasil capaian tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi Pemerintah dalam mendorong kebijakan peningkatan produksi perkebunan.

Data PDB Sub Sektor Perkebunan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap triwulan dengan *lag* (jeda waktu) selama dua bulan per triwulan. Pertumbuhan PDB Sub Sektor perkebunan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan perkebunan dari tahun ke tahun (Y on Y) atau triwulan ke triwulan (Q to Q) atas dasar harga konstan.

## Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2022, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor Perkebunan sesuai dengan data di Badan Pusat Statistik bahwa data realisasi belum dirilis sesuai dengan ringkasan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.1 1.1 Pertumbuhan PDB Subsektor Perkebunan	%	1,0 – 1,5	-0.24	-24

## Narasi Capaian IKU

Berdasarkan data BPS (2022), Pertumbuhan PDB Subsektor Perkebunan pada Q1/2022 atau selama Bulan Januari-Maret 2022 sebesar -0,24 atau terealisasi sebesar -24% dari target yang telah ditetapkan di Keasdepan Pengembangan Agribisnis Perkebunan yaitu sebesar 1,0-1,5%. Meskipun PDB Subsektor Perkebunan mengalami penurunan pada kuartal 1 tahun 2022, Subsektor perkebunan berkontribusi paling besar terhadap PDB sector pertanian kuartal I tahun 2022 dengan persentase kontribusi sebesar 37,32%.

Sub Sektor Perkebunan tetap tumbuh di tengah masa pemulihan pandemi Covid-19 Pemerintah berperan aktif dalam penguatan Agribisnis Kelapa Sawit melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) dan Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Selain itu, peningkatan harga kelapa sawit serta peningkatan permintaan konsumsi komoditas perkebunan, daya beli, stabilitas harga (terutama kelapa sawit dan karet), sedang gencarnya investasi salah satunya dalam pabrik pengolahan industri gula dan komoditas berorientasi ekspor seperti kelapa sawit, karet kopi, kelapa, dan lain-lain serta volume ekspor minyak kelapa sawit ke beberapa negara yang terhitung stabil.

## Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I

### Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perkebunan

No.	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Output TW I	% Capaian Output
1.	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	5.000.000.000	1.915.330.876	2 Paket Rekomendasi Kebijakan	38,31

### Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sub Sektor Perkebunan

No.	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Stabilisasi Harga Minyak Goreng	Terlaksana	Rapat dihadiri oleh Kementerian/Lembaga dan stakeholders terkait dan memandang perlu dilaksanakan review dalam rangka stabilisasi harga CPO dan harga minyak goreng domestic melalui program-program yang dimandatkan kepada BDPKKS dan

			mendorong pengembangan hilirisasi sawit yang berdaya saing.
2.	Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2022	Terlaksana	Rapat dilaksanakan bersama K/L terkait dengan pembahasan terkait skema terbaik yang dapat diimplementasikan dalam program pembiayaan PSR. Pemerintah juga memberikan kemudahan serta dukungan regulasi sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dengan aparat pengawas dalam melakukan pemeriksaan.
3.	Pelaksanaan The 3rd Senior Officials Meeting of CPOPC di Langkawi Malaysia	Terlaksana	Rapat dihadiri oleh Delegasi Indonesia dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta Perwakilan dari Private Sector. Delegasi observer CPOPC menyampaikan apresiasi terhadap upaya CPOPC dalam mendorong peningkatan nilai ekonomi minyak sawit. Sektor kelapa sawit dinilai memiliki arti strategis bagi negara produsen kelapa sawit, utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
4.	Rapat Koordinasi terkait ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)	Terlaksana	Rapat dilaksanakan bersama K/L terkait untuk Menindaklanjuti Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah ISPO Nomor 257 Tahun 2020 tentang Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang mengamanatkan pembentukan Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Komite ISPO).
6.	Rapat Koordinasi Kebijakan Peremajaan Kelapa	Terlaksana	Rapat dilaksanakan bersama K/L terkait dengan pembahasan terkait tindak lanjut korporasi peremajaan kelapa tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Rapat dilaksanakan untuk menindak lanjuti

			peremajaan kelapa yang targetnya adalah petani kelapa yang tidak masuk dalam close loop dengan PT Unilever Indonesia yang ditargetkan untuk melakukan peremajaan dengan dibantu oleh K/L lainnya.
7.	Rapat Koordinasi Kebijakan Kelapa Berkelanjutan	Terlaksana	<p>Rapat dilaksanakan bersama K/L dan Bupati daerah sentra penghasil kelapa yang tergabung kedalam KOPEK (Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa) yang dilaksanakan untuk mengkonsepkan kelapa berkelanjutan.</p> <p>Komoditas kelapa merupakan komoditas yang perkebunan dengan potensi ekonomi yang luas karena memiliki produk turunan yang banyak serta setiap bagian dari tumbuhan kelapa dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Namun kondisi saat ini Kelapa Indonesia mengalami penurunan produksi dan produktivitas. Hal ini disebabkan oleh umur kelapa yang sudah tua dan juga perawatan perkebunan yang kurang maksimal sehingga dibutuhkan badan pengelola dana kelapa berkelanjutan sebagai organisasi penyokong peningkatan produktivitas kelapa Indonesia lewat peremajaan serta praktisi perkebunan kelapa yang menghasilkan perkebunan kelapa yang maksimal.</p>
8.	Focus Group Discussion “Persiapan Menuju Ekonomi Hijau”	Terlaksana	<p>Kegiatan FGD dilaksanakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah mengundang K/L dengan melibatkan asosiasi terkait guna memperoleh informasi yang lebih luas.</p> <p>Ekonomi Hijau merupakan mandat dari Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 yang didalamnya diamanatkan untuk melaksanakan penyusunan design alur mekanisme sertifikasi pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dalam SRN PPI, mekanisme SPE /ICER ini dirancang sebagai tools dalam</p>

			rangka penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
9.	Rapat Persiapan Indonesia Premium Coffee Expo & Forum 2022	Terlaksana	Sebagai komoditas perkebunan ketiga terbesar setelah sawit dan karet, tanaman kopi memiliki kontribusi terhadap PDB perkebunan sebesar 16,15%. Sebanyak 7,8 juta jiwa penduduk Indonesia menggantungkan hidup dari perkebunan kopi. Indonesia Premium Coffee Expo & Forum 2022 juga membidik perluasan pasar global dengan menjadikan pertemuan G-20 di Bali dan konferensi perubahan iklim COP-27 di Mesir 2022 sebagai rangkaian kegiatan. Hal ini akan memberikan manfaat bagi perluasan rantai nilai dan strategi pemasaran guna memperkuat “Trade Mark” sekaligus meningkatkan penjualan kopi nasional ke manca negara.
10.	Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Dewan ICO (International Coffee Organization) ke-32	Terlaksana	Dalam rangka mendukung aktivitas perdagangan sektor kopi, Indonesia bergabung dengan Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization/ICO). Tujuan utama ICO adalah untuk memperkuat sektor komoditi kopi secara global dan pengembangan berkelanjutan pada market-based environment untuk kemajuan seluruh negara anggota.
11.	Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan The 105th ICCO (International Cocoa Organization) Regular Session of the International Cocoa Council and subsidiary bodies	Terlaksana	Dalam rangka mendukung aktivitas sektor perdagangan kakao, Indonesia tergabung dalam International Cocoa Organization yang terdiri atas negara produsen dan konsumen kakao. ICCO berkomitmen untuk Mendorong kerjasama internasional dalam perekonomian makro dunia, menyediakan framework yang tepat untuk mendiskusikan berbagai hal yang berhubungan dengan berbagai sektor, berkontribusi dalam memperkuat keseimbangan pengembangan perekonomian

			kakao dunia dan berkontribusi dalam pengembangan keseimbangan perekonomian kakao dunia bagi kepentingan seluruh negara anggota hal ini dilaksanakan melalui kegiatan untuk terus mendorong perekonomian kakao dunia serta mengembangkan penelitian berbasis kakao dan mengimplementasikan di negara produsen kakao.
12.	Menjadi Delegasi pada Pertemuan-pertemuan Internasional Karet	Terlaksana	Mengikuti Perkembangan kebijakan-kebijakan karet internasional pada forum ITRC Mengikuti Perkembangan kebijakan-kebijakan karet internasional pada forum ANRPC
13.	Grand launching Platform Karet Berkelanjut SNARPI	Terlaksana	SNARPI merupakan platform yang diharapkan mampu mendorong terciptanya komoditas karet yang berkelanjutan di Indonesia. Grand launching SNARPI merupakan puncak dari serangkaian kegiatan yang dimulai dengan soft launching kemudian dilanjutkan dengan diadakannya focus group discussion yang diadakan sebanyak empat chapter yang menghasilkan acuan dalam menentukan prinsip, kriteria serta program Strategis SNARPI sebagai Platform perkebunan karet berkelanjutan di Indonesia
14.	Kebijakan Pembangunan Kakao Berkelanjutan	Terlaksana	Melakukan kunjungan kerja ke Pusat Penelitian Kakao milik PT Mars di Luwu, Sulawesi Selatan Mengamati pendekatan hulu-hilir untuk membangun kakao Indonesia yang berkelanjutan baik dari aspek kelembagaan maupun pengembangan usahanya

### Rekomendasi

Adapun 2 (dua) paket rekomendasi kebijakan pertumbuhan PDB sub sektor perkebunan antara lain sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan
  - a. Rekomendasi tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan beberapa Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan.

- b. Dengan diundangkannya PMK No.76 Tahun 2022 tentang 76/PMK.05/2022 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, termasuk CPO dan produk turunannya ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan cut off perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dengan adanya perubahan ini diharapkan terjadi keseimbangan antara pengembangan subsistem hulu dan hilir industri sawit secara berkelanjutan yang kemudian memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan PDB.
  - c. Dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan, pemerintah melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diharapkan menjadi program strategis dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas yang secara tidak langsung juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat dengan target 180.000 Ha di tahun 2022 dan target realisasi sebesar 500.000 ha selama tahun 2022-2022. Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat telah dilaksanakan di 5 lokasi sentra melalui pertemuan koordinasi serta pemberkasan dokumen PKSP di masing-masing provinsi.
  - d. Strategi lain yang ditempuh untuk mendukung kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan melalui pemetaan lahan dan potensi produk tiap wilayah (One Village One Product), pengembangan kemitraan hulu dan hilir, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerapan teknologi, serta kemudahan pembentukan koperasi petani/pekebun.
  - e. Pemerintah juga memberikan izin akses lahan hutan melalui Program Perhutanan Sosial yang diharapkan dalam pemanfaatan hutan maka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun.
  - f. Pemberlakuan kebijakan sistem beli putus untuk meningkatkan produktivitas tebu petani maupun kualitasnya.
  - g. Pengevaluasian pertambahan luas kebun tebu seiring peningkatan investasi pabrik gula baru dan perluasan kebun tebu melalui kerjasama penggunaan lahan Perhutani.
- 2) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Perkebunan
- a. Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor perkebunan dilakukan melalui upaya pemerintah dalam hal peningkatan daya saing produk perkebunan.
  - b. Beberapa program yang menjadi fokus pemerintah yaitu pembangunan logistik benih, peningkatan produksi dan optimalisasi lahan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan ekonomi pekebun, inisiasi sistem Traceability dan Sustainability, digitalisasi dan e-commerce, serta transformasi ekspor.
  - c. Beberapa komoditas perkebunan yang memiliki daya saing tinggi adalah kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan kelapa. Selain itu, program yang masih terus didorong oleh pemerintah yaitu pengembangan produk kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan.
  - d. Kampanye positif sawit terutama baik kepada masyarakat dalam negeri dan dunia internasional penting dilakukan supaya nilai ekspor kelapa sawit dan produk turunannya tetap terjaga dan tetap memberikan kontribusi positif bagi Perekonomian Nasional melalui peningkatan PDB Pertanian.

### **Kendala Pencapaian Target**

Selama tahun 2022, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Masih adanya pembatasan perdagangan internasional untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh beberapa negara importir sehingga membuat berkurangnya volume ekspor produk perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kopi dll).

- Adanya bentuk negative campaign (kampanye negatif) yang dilakukan oleh negara lain terhadap komoditas perkebunan Indonesia.

## 1.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat Latar Belakang

### 1.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat

Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat adalah perbandingan indeks harga tanaman perkebunan rakyat yang diterima petani tanaman perkebunan rakyat (It) terhadap indeks harga tanaman perkebunan rakyat yang dibayar petani tanaman perkebunan rakyat (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Jika  $NTP > 100$  berarti petani mengalami kondisi surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya dan pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Jika  $NTP = 100$  berarti petani mengalami kondisi impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi, sehingga dapat dinyatakan pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Sedangkan jika  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya, dan dalam kondisi ini kesejahteraan petani turun karena pendapatan lebih kecil dari pengeluarannya. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Adapun data NTP dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemilihan NTP Perkebunan sebagai salah satu dari Indikator Kinerja Asdep Pengembangan Agribisnis Perkebunan adalah wujud dari peran Kemenko Perekonomian untuk memastikan kesejahteraan petani, meningkatkan semangat Petani/Pekebun dalam melakukan pengelolaan lahan perkebunan dengan baik dan berkelanjutan, sehingga terciptanya kedaulatan produk tanaman perkebunan rakyat yang berkualitas.

### Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.2 1.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat	Indeks	105	133,43	127 (memenuhi ekspektasi)

### Narasi Capaian IKU

Berdasarkan data BPS (2022), rata-rata NTP Perkebunan Rakyat Januari s.d Maret 2022 sebesar 133,43. Kenaikan NTP Maret 2022 terutama dipengaruhi oleh naiknya NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,87% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan indeks yang diterima Petani (It) Perkebunan Rakyat pada Januari 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,47 % yang disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat khususnya komoditas kelapa sawit dan karet. Lima komoditas utama perkebunan penyumbang proporsi terbesar pada NTP perkebunan, yaitu kelapa sawit (26,54%), karet (26,37%), kopi (10,77%), kakao (7,87%), dan tebu (7,62%). Perubahan harga internasional terhadap 5 komoditas tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani

perkebunan. Perubahan tahun dasar perhitungan NTP Perkebunan juga berpengaruh pada melonjaknya nilai NTP Perkebunan secara drastis. Semula tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2012 kemudian dirubah tahun dasarnya menjadi tahun 2018. Hasil analisis ekonometrika dengan Vector Error Correction Model (VECM) menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi NTP Perkebunan pada jangka pendek adalah harga CPO pada 1 dan 2 periode sebelumnya (signifikan dan positif) dan suku bunga periode sebelumnya (signifikan dan negatif). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi NTP Perkebunan pada jangka panjang adalah harga CPO, harga karet, dan kurs rupiah (signifikan dan positif); serta harga kopi (signifikan dan negatif). Korelasi harga 5 komoditas utama perkebunan dengan NTP Perkebunan adalah berkorelasi kuat dengan harga komoditas CPO dan karet, berkorelasi sedang dengan harga komoditas gula dan kopi, serta berkorelasi lemah dengan harga komoditas kakao.

Berdasarkan hasil capaian Triwulan I tahun 2022, Asisten Pengembangan Agribisnis Perkebunan memperkirakan bahwa target Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) tahun 2022 dapat terpenuhi.

**Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I  
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perkebunan**

No.	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Output TW I	% Capaian Output
1.	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	5.000.000.000	1.915.330.876	2 Paket Rekomendasi Kebijakan	38,31

No.	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rapat Pengembangan Kakao Berkelanjutan dengan Pendekatan Agroforestri serta Kunjungan ke Kebun Percobaan dan Fasilitas RnD PT Mars di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.	Terlaksana	Keberadaan petani kakao di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan sangat penting bagi perekonomian Indonesia mengingat produksi kakao Indonesia mayoritas merupakan produksi petani asal Sulawesi, namun perkembangan industri pengolahan kakao yang memiliki tren meningkat tetapi tidak berbanding lurus dengan produksi kakao yang terus mengalami penurunan.
2.	Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka Panen dan Tanam Perdana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau	Terlaksana	Kunjungan kerja dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis yang mewakili Menterian Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri gubernur Provinsi Riau, Anggota DPR RI, beberapa K/L dan asosiasi terkait. Diharapkan mampu mendorong pengembangan Research and Development (R&D) agar semakin banyak

			variasi pemanfaatan kelapa sawit secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan efisiensi serta kualitas produk kelapa sawit.
3.	Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka Temu Petani Kelapa Sawit serta penanaman perdana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.	Terlaksana	Kegiatan penanaman perdana Program Peremajaan Sawit Rakyat dilaksanakan. Dalam rangka Peringatan Hari Lahir ke-96 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung pada lahan kebun kelapa sawit milik koperasi Serasa Mulya, Koperasi Maju Bersama, dan Gapoktan Sepakat dengan total luas lahan sebesar 328,5 ha. Pada tahap pengajuan PSR Tahun 2022 di Kabupaten Muara Enim dengan target usulan lahan seluas 1.399 ha lahan petani yang tergabung dalam 11 koperasi atau Gapoktan.
4.	Rapat Persiapan Indonesia Premium Coffee Expo & Forum 2022	Terlaksana	Indonesia Premium Coffee Expo & Forum 2022 juga membidik perluasan pasar global dengan menjadikan pertemuan G-20 di Bali dan konferensi perubahan iklim COP-27 di Mesir 2022 sebagai rangkaian kegiatan. Hal ini akan memberikan manfaat bagi perluasan rantai nilai dan strategi pemasaran guna memperkuat “ <i>Trade Mark</i> ” sekaligus meningkatkan penjualan kopi nasional ke manca negara.
5.	Monitoring dan Evaluasi kebijakan pergulaan dengan Pabrik Gula Kebon Agung Malang Jawa Barat	Terlaksana	PG Kebon Agung bersama dengan petani mitra melakukan perluasan lahan perkebunan tebu namun dari tahun 2017 terjadi penurunan jumlah luas lahan perkebunan tebu. Pada tahun 2021 terjadi penurunan luas lahan dengan luas lahan pada 2021 17.210 ha sedangkan pada tahun 2020 17.214 ha. Pelaksanaan sistem SPT saat ini berdampak dengan perilaku petani melakukan panen dini karena pendapatan mereka hanya dipengaruhi oleh bobot sehingga mereka mengabaikan kualitas yang

			berdampak tidak maksimalnya penggilingan yang dilakukan oleh PG. Pelaksanaan SPT saat ini membutuhkan pihak ke-3 sebagai penengah petani dan PG sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan pelaksanaan SPT.
--	--	--	--

#### Rekomendasi

Untuk mendukung pencapaian IKU NTP Tanaman Perkebunan Rakyat, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan melalui kegiatan koordinasi dan pengendalian kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Pusat Statistik, serta petani, asosiasi pelaku usaha komoditas untuk memastikan produksi dalam rangka stabilisasi harga, serta upaya meningkatkan nilai tambah produk petani perkebunan. Adapun 2 (dua) paket rekomendasi kebijakan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat sampai dengan Triwulan I antara lain sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Harga Komoditas Tanaman Perkebunan Rakyat
  - a. Sasaran kebijakan dalam rangka stabilisasi harga komoditas tanaman perkebunan rakyat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan yang diukur melalui pendapatan petani perkebunan dan mendukung peningkatan produktivitas petani tanaman perkebunan rakyat.
  - b. Kebijakan stabilisasi harga komoditas tanaman perkebunan rakyat (khususnya karet dan kelapa sawit yang merupakan komoditas unggulan) diarahkan untuk mendorong inovasi, agribisnis dan agroindustri, investasi, dan konservasi lingkungan.
  - c. Dalam rangka stabilisasi harga karet, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait berkoordinasi untuk menggunakan produk aspal karet untuk mendongkrak harga karet rakyat.
  - d. Penguatan produktivitas perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang secara beriringan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani perkebunan.
  - e. Penerapan kebijakan sistem beli putus (SPT) tebu petani diharapkan dapat mensejahterakan petani tebu dan menjaga stabilitas harga gula pada harga yang wajar.
- 2) Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Petani melalui Optimalisasi Input Produksi
  - a. Sasaran kebijakan perlindungan petani melalui optimalisasi input produksi diperlukan untuk menjaga kesejahteraan petani/pekebun.
  - b. Hal ini ditunjukkan Pada Triwulan I tahun 2022 ( Januari – Maret 2022), rata-rata NTP Perkebunan Rakyat sebesar 133,43 atau mencapai 127% dari target yang ditetapkan sebesar 105.
  - c. Kebijakan SPT tebu dapat memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kesejahteraan petani tebu.

#### Faktor Keberhasilan Pencapaian Target

Terdapat beberapa faktor kunci yang mampu memberikan dukungan dalam proses tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Terkendalinya produksi dan harga komoditas tanaman perkebunan rakyat (terutama kelapa sawit, karet, dan gula) selama pandemi Covid-19;
2. Selama memasuki masa PPKM, relatif tidak terjadi gejala/fluktuasi harga yang signifikan baik di tingkat hulu maupun hilir.

#### Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Pembatasan kegiatan ekspor oleh negara-negara tujuan ekspor utama (importir) untuk mengurangi penyebaran Covid-19;
2. Harga dari beberapa komoditas tanaman perkebunan rakyat khususnya komoditas ekspor seperti kelapa sawit dan karet dalam negeri masih dipengaruhi/dikendalikan oleh harga di tingkat internasional.
3. Terbatasnya cash flow Pabrik Gula (PG) BUMN untuk melaksanakan kebijakan SPT sehingga pelaksanaannya baru sekitar 20% dari PG BUMN yang ada.
4. Kebijakan SPT dilapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya, misalnya tebu petani dihargai lebih mahal oleh PG yang mendapatkan alokasi impor RS. Di satu sisi hal tersebut menguntungkan petani, namun disisi lain pembelian tebu dengan harga tinggi di atas harga SPT yang dikeluarkan Kementan dapat menjadi predatory pricing bagi PG lainnya khususnya PG BUMN sehingga dapat gulung tikar dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.
5. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan petani khususnya swadaya mengalami keterlambatan pengiriman hasil panen dan input produksi seperti pupuk.

## 2

### Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Efektif.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan
2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<p><b>2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan</b></p>	<p><b>Latar Belakang</b></p> <p>Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikatakan efektif dan berkualitas apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan K/L terkait puas dengan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang diberikan.</p> <p>Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan kebijakan di bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat Baik, rentang nilai 85 – 100 (4)</li> <li>b. Baik, rentang nilai 75 – 84 (3)</li> <li>c. Cukup, rentang nilai 65 – 74 (2)</li> <li>d. Kurang, rentang nilai &lt;65 (1)</li> </ol> <p>Adapun nilai dari indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan diperoleh melalui penilaian dari 2 (dua) sub indikator :</p> <p>Sub indikator pertama, merupakan Persentase Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang ditindaklanjuti. Persentase Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan</p>
--	---

jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh unit kerja sebagai hasil dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, dan penyelesaian permasalahan antar Kementerian, pelaksanaan pengendalian kebijakan, pengawalan program prioritas, dan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L terkait kebijakan tersebut.

Adapun Instrumen kebijakan yang ditindaklanjuti oleh K/L antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh kantor Kemenko Perekonomian (PP, Perpres, Permenko, dll)
2. Regulasi yang dihasilkan oleh Presiden dan K/L lain sebagai dampak/tindak lanjut dari hasil proses dan koordinasi yang dikeluarkan kantor Kemenko Ekon
3. Surat dari K/L terkait
4. Kesepakatan kerjasama ekonomi internasional
5. Notula Rapat yang diselenggarakan oleh Presiden melalui Ratas atau K/L terkait sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian

Adapun Instrumen kebijakan yang dihasilkan oleh menko perekonomian antara lain :

1. Rumusan kebijakan yang telah diparaf pimpinan (Nota Dinas Surat Keluar);
2. Siaran pers yang dikeluarkan oleh kantor Kemenko Perekonomian; dan/atau
3. Draft Kesepakatan kerja sama ekonomi hasil pertemuan internasional yang dipimpin/inisiasi oleh Kemenko Perekonomian
4. Risalah/notulensi/Berita Acara Kegiatan rapat koordinasi level Menteri/Deputi/Asisten Deputi

Sub indikator pertama memiliki nilai maksimal 80 dengan perhitungan jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi kebijakan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang dihasilkan dikali dengan 80.

Sub indikator kedua, merupakan indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Pada sub indikator ketiga ini, variabel indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asdep Pengembangan Agribisnis Perkebunan dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu:(1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Untuk sub indikator kedua. Indeks kepuasan layanan koordinasi dapat dibuktikan dengan penghargaan atau apresiasi dari pihak luar yang kredibel. Apabila unit kerja telah mendapatkan penghargaan atau apresiasi tersebut, maka unit kerja tidak perlu melakukan survey kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian; dan langsung memperoleh nilai bobot pengukuran secara penuh yaitu 20 poin.

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2022, Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan belum diketahui dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Indeks	3 dari 4	N/A	N/A

### Narasi Capaian IKU

Berdasarkan hasil capaian Triwulan I tahun 2022, target Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan Tahun 2022 belum bisa diukur, dikarenakan belum adanya survei pelayanan kepada K/L terkait. Adapun kendala yang menyebabkan belum maksimalnya capaian Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan di triwulan I adalah keterbatasan pelaksanaan rapat koordinasi bersama K/L terkait dikarenakan pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada triwulan I untuk mencapai target Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang kontinyu terhadap beberapa hasil kebijakan yang telah disepakati dalam rapat koordinasi lintas K/L terkait. Untuk mendorong realisasi Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan di triwulan berikutnya akan dilakukan penyempurnaan metode pengambilan survey baik dalam menghitung indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta mempercepat penyelesaian hasil rapat koordinasi yang diperlukan bagi K/L dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah disepakati atau ditetapkan. Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan I dan upaya yang akan dilakukan di triwulan mendatang maka target kinerja tahun 2022 diproyeksikan dapat tercapai.

### Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I

#### Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perkebunan

No.	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Output TW I	% Capaian Output
1.	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	5.000.000.000	1.915.330.876	2 Paket Rekomendasi Kebijakan	38,31

#### Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan

No.	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Matriks Hasil Rapat Koordinasi (Tingkat Menteri/Eselon I/Eselon II)	Terlaksana	Matriks Hasil Rapat Koordinasi (Tingkat Menteri/Eselon I/Eselon II) disusun dari Januari s.d Maret 2022
2.	Rapat Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi (Tingkat Menteri/Eselon I/Eselon II) TW I	Terlaksana	Rapat Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi (Tingkat Menteri/Eselon I/Eselon II) terlaksana seperti Rakornis terkait Kebijakan Minyak Goreng, Kampanye Positif Kelapa Sawit, Pengembangan Komoditas Kelapa, Kebijakan Pergulaan, dll
3.	Survey Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Awal Tahun	Belum Terlaksana	Belum dilakukan survey kepuasan layanan kepada K/L terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="505 180 574 279"></td> <td data-bbox="574 180 873 279"></td> <td data-bbox="873 180 1421 279">Perdagangan, Kementerian Keuangan, BPDPKS, Asosiasi dan Lembaga terkait).</td> </tr> </table>			Perdagangan, Kementerian Keuangan, BPDPKS, Asosiasi dan Lembaga terkait).							
		Perdagangan, Kementerian Keuangan, BPDPKS, Asosiasi dan Lembaga terkait).									
<p><b>2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan</b></p>	<p><b>Kendala Pencapaian Target</b> Keterbatasan pelaksanaan rapat koordinasi bersama K/L terkait dikarenakan pandemi Covid-19 masih belum berakhir.</p> <p><b>Rekomendasi Pencapaian Target</b> Adapun rekomendasi dalam mencapai target kinerja ke depan, sebagai berikut: Mengoptimalkan rapat melalui media online mengingat pandemi Covid-19 masih belum berakhir.</p> <p>Kebijakan yang berkualitas dihasilkan dari proses analisis yang dalam dan komprehensif. Untuk itu, dalam rangka perumusan kebijakan bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan diperlukan analisa kebijakan berupa karya tulis kedinasan (naskah akademik RUU, RPerpres, RPermen, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, dan Advokasi Kebijakan) dan karya tulis ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah). Adapun IKU Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan merupakan indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian atas dokumen analisis kebijakan yang ditargetkan. Dokumen Analisis Kebijakan yang dihasilkan nantinya harus mendapat persetujuan dari Deputi. Dengan terpenuhinya Indikator kinerja ini, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan namun juga diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan Kompetensi ASN yang merupakan “ultimate indicator” pada sasaran startegis di level Kementerian.</p>										
	<p><b>Hasil Pengukuran Kinerja</b></p> <p>Hingga Triwulan I Tahun 2022, Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang telah terealisasi sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="505 1413 727 1476">Indikator Kinerja Utama</th> <th data-bbox="727 1413 911 1476">Satuan</th> <th data-bbox="911 1413 1073 1476">Target</th> <th data-bbox="1073 1413 1243 1476">Realisasi</th> <th data-bbox="1243 1413 1421 1476">% Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="505 1476 727 1761">IKU-2.2 2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan</td> <td data-bbox="727 1476 911 1761">Persentase</td> <td data-bbox="911 1476 1073 1761">20%</td> <td data-bbox="1073 1476 1243 1761">20%</td> <td data-bbox="1243 1476 1421 1761">100 (Memenuhi Ekspektasi)</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja	IKU-2.2 2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Persentase	20%	20%	100 (Memenuhi Ekspektasi)
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja							
IKU-2.2 2.2. Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Persentase	20%	20%	100 (Memenuhi Ekspektasi)							
	<p><b>Narasi Capaian IKU</b></p> <p>Realisasi Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan pada Triwulan I tahun 2022 sudah memenuhi target. Pencapaian kinerja triwulan I tahun 2022 terealisasi dengan baik ditopang dengan kemampuan menjalankan proses bisnis dengan baik dan output yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Adapun kendala yang menyebabkan belum maksimalnya Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis</p>										

Perkebunan di triwulan I adalah keterbatasan pelaksanaan rapat koordinasi bersama K/L terkait dikarenakan pandemi Covid-19 masih belum berakhir, namun dapat diatasi dengan mengoptimalkan rapat via daring mengingat pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada triwulan I untuk menjaga Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang kontinyu terhadap beberapa hasil kebijakan yang telah disepakati dalam rapat koordinasi lintas K/L terkait. Untuk mendorong realisasi Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan di triwulan berikutnya akan dilakukan percepatan penyelesaian hasil rapat koordinasi yang diperlukan bagi K/L dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah disepakati atau ditetapkan. Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan I dan upaya yang akan dilakukan di triwulan mendatang maka target kinerja tahun 2022 diproyeksikan dapat tercapai.

**Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I  
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perkebunan**

No.	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Output TW I	% Capaian Output
1.	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	5.000.000.000	1.915.330.876	2 Paket Rekomendasi Kebijakan	38,31

No.	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi Kebijakan Pergulaan	Terlaksana	Rapat dilaksanakan bersama K/L terkait dengan pembahasan terkait evaluasi kebijakan gula, pembangunan kebun tebu melalui Agroforestri Perhutani, kebijakan sistem beli putus, rencana pembentukan BPDP Tebu di Yogyakarta, dan stabilisasi harga gula. Gula merupakan komoditas strategis yang menopang perekonomian nasional sehingga diperlukan jaminan keberlanjutannya baik melalui pemerhatian terhadap kesejahteraan petaninya maupun kebijakan investasi industri gula yang sejalan dengan peningkatan luas kebun tebu.
2.	Rakornis Percepatan Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2022	Terlaksana	Rapat dilaksanakan bersama K/L terkait dengan pembahasan terkait skema terbaik yang dapat

			diimplementasikan dalam program pembiayaan PSR. Pemerintah juga memberikan kemudahan serta dukungan regulasi sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dengan aparat pengawas dalam melakukan pemeriksaan.
3.	Rapat Koordinasi terkait ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)	Terlaksana	Rapat dilaksanakan bersama K/L terkait untuk Menindaklanjuti Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah ISPO Nomor 257 Tahun 2020 tentang Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang mengamanatkan pembentukan Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Komite ISPO).
4.	Rapat Koordinasi Kebijakan Peremajaan Kelapa	Terlaksana	Rapat dilaksanakan bersama K/L terkait dengan pembahasan terkait tindak lanjut korporasi peremajaan kelapa tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Rapat dilaksanakan untuk menindak lanjuti peremajaan kelapa yang targetnya adalah petani kelapa yang tidak masuk dalam close loop dengan PT Unilever Indonesia yang ditargetkan untuk melakukan peremajaan dengan dibantu oleh K/L lainnya.
<p><b>Kendala Pencapaian Target</b></p> <p>Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan pelaksanaan rapat koordinasi bersama K/L terkait dikarenakan pandemi Covid-19 masih belum berakhir.</li> <li>2. Belum kuatnya koordinasi lintas sektor dan lintas K/L.</li> </ol> <p><b>Rekomendasi Pencapaian Target</b></p> <p>Adapun rekomendasi dalam mencapai target kinerja ke depan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas K/L dengan cara mengintensifkan rapat-rapat koordinasi dalam upaya mencapai output kegiatan di bidang Perkebunan.</li> </ol>			

	2. Keterbatasan pelaksanaan rapat koordinasi bersama K/L terkait akan diatasi dengan mengoptimalkan rapat melalui media <i>online</i> mengingat pandemi Covid-19 masih belum berakhir.
--	--

**3 Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Baik**

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Baik ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase ASN Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Memenuhi Ketentuan Jam Pelajaran (JP) ASN
2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<p><b>3.1 Persentase ASN Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Memenuhi Ketentuan Jam Pelajaran (JP) ASN</b></p>	<p><b>Latar Belakang</b></p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam pelajaran. Adapun pemenuhan 20 Jam pelajaran dapat dilakukan dengan mengikuti seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop/lokakarya, dan benchmarking. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang memenuhi jam pelatihan melalui keikutsertaan dalam seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, workshop/lokakarya, dan benchmarking merupakan alat untuk mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dalam memenuhi jam pelajaran sebanyak 20 jam pelatihan melalui keikutsertaan dalam FGD/seminar/workshop mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p> <p><b>Hasil Pengukuran Kinerja</b></p> <p>Hingga Triwulan I Tahun 2022, Persentase ASN Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Memenuhi Ketentuan Jam Pelajaran (JP) ASN telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="488 1419 1393 1757"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Satuan</th> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> <th>% Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IKU-3.1 3.1. Persentase ASN Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Memenuhi Jam Pelajaran (JP) ASN</td> <td>Persentase</td> <td>20%</td> <td>22%</td> <td>110% (Memenuhi Ekspektasi)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi Persentase ASN Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Memenuhi Ketentuan Jam Pelajaran (JP) ASN pada Triwulan I tahun 2022 sudah memenuhi target. Dari jumlah total 9 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Asdep Pengembangan Agribisnis Perkebunan terdapat 2 ASN yang telah memenuhi 20 jam pelajaran (JP) pada triwulan I, sementara 7 ASN juga tetap mengikuti pelatihan, FGD/seminar/workshop namun belum mencapai 20 jam pelajaran (JP).</p>	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja	IKU-3.1 3.1. Persentase ASN Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Memenuhi Jam Pelajaran (JP) ASN	Persentase	20%	22%	110% (Memenuhi Ekspektasi)
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja							
IKU-3.1 3.1. Persentase ASN Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Memenuhi Jam Pelajaran (JP) ASN	Persentase	20%	22%	110% (Memenuhi Ekspektasi)							

Pencapaian kinerja triwulan I tahun 2022 terealisasi dengan baik ditopang dengan dukungan tata kelola deputy bidang koordinasi pangan dan agribisnis yang baik. Adapun kendala yang menyebabkan belum maksimalnya Persentase Persentase ASN Asisten Deputy Pengembangan Agribisnis Perkebunan di triwulan I adalah keterbatasan akses informasi terhadap pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pemenuhan jam pelajaran (JP) ASN.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada triwulan I untuk menjaga Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan dengan melakukan pemberian kesempatan akses terhadap pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pemenuhan jam pelajaran (JP) ASN. Untuk mendorong realisasi Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan di triwulan berikutnya akan dilakukan peningkatan akses informasi terhadap pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pemenuhan jam pelajaran (JP) ASN Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan I dan upaya yang akan dilakukan di triwulan mendatang maka target kinerja tahun 2022 diproyeksikan dapat tercapai.

### **Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I**

#### **Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perkebunan**

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Output Tw I	% Capaian Output
1	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	5.000.000.000	1.915.330.876	2 Paket Rekomendasi Kebijakan

#### **Persentase ASN Asisten Deputy Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang Memenuhi Ketentuan Jam Pelajaran (JP) ASN**

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan ( dapat berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1	Mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training, Seminar/Workshop/Loka Karya/FGD Kompetensi Kebijakan	Terlaksana	Keterlibatan ASN dalam mengikuti Seminar/ Workshop/Loka Karya/FGD Kompetensi Kebijakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta arahan dari Pimpinan
2	Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional	Terlaksana	Keterlibatan ASN dalam mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional pada bulan Januari dan Februari
3	Melaksanakan Izin Belajar	Terlaksana	Keterlibatan ASN dalam program izin belajar yg dilaksanakan sejak tahun

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="492 191 565 285"></td> <td data-bbox="565 191 919 285"></td> <td data-bbox="919 191 1404 285">2021 hingga akhir tahun 2022.</td> </tr> </table>			2021 hingga akhir tahun 2022.							
		2021 hingga akhir tahun 2022.									
	<p><b>Kendala Pencapaian Target</b> Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan waktu pegawai untuk dapat mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training, Seminar/Workshop/Loka Karya/FGD Kompetensi Kebijakan dan Pelatihan Jabatan</li> <li>2. Keterbatasan akses informasi terkait Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training, Seminar/Workshop/Loka Karya/FGD Kompetensi Kebijakan dan Pelatihan Jabatan Fungsional.</li> </ol> <p><b>Rekomendasi Pencapaian Target</b> Adapun rekomendasi dalam mencapai target kinerja ke depan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan akses informasi terkait Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training, Seminar/Workshop/Loka Karya/FGD Kompetensi Kebijakan dan Pelatihan Jabatan Fungsional.</li> <li>2. Pemberian kesempatan akses terhadap pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pemenuhan jam pelajaran (JP) ASN.</li> </ol>										
<p><b>3.2 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan</b></p>	<p><b>Latar Belakang</b> Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Rumus Pengukuran persentase kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari unsur penyerapan anggaran dan unsur pencapaian kinerja keluaran (output) yang masing-masing diberikan bobot 50% (lima puluh perseratus) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Kualitas Pelaksanaan Anggaran</b> = (% penyerapan anggaran x 50%) + (% pencapaian keluaran x 50%)</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>•% Penyerapan anggaran = (realisasi penyerapan belanja : pagu belanja) x 100%</li> <li>•% Pencapaian keluaran= (realisasi keluaran : target keluaran) x 100%</li> </ul>										
	<p><b>Hasil Pengukuran Kinerja</b> Hingga Triwulan I Tahun 2022, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang telah terealisasi sebesar 28,86% atau mencapai 134,28% dari target triwulan I Tahun 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">Satuan</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">Target</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">Realisasi</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">% Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IKU-3.2 3.2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan</td> <td>Persentase</td> <td>30%</td> <td>44,87%</td> <td>149,57% (Memenuhi Ekspektasi)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan pada Triwulan I tahun 2022 sudah memenuhi target.</p>	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja	IKU-3.2 3.2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Persentase	30%	44,87%	149,57% (Memenuhi Ekspektasi)
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja							
IKU-3.2 3.2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Persentase	30%	44,87%	149,57% (Memenuhi Ekspektasi)							

Pencapaian kinerja triwulan I tahun 2022 terealisasi dengan baik ditopang dengan efektivitas pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Adapun kendala yang menyebabkan belum maksimalnya Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan di triwulan I adalah kondisi Pandemi yang masih belum pulih menyebabkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output kegiatan dan serapan anggaran sedikit terhambat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada triwulan I untuk menjaga Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan dengan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan baik yang tertuang dalam rencana aksi maupun arahan direktif dari pimpinan. Untuk mendorong realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan di triwulan berikutnya akan dilakukan penyempurnaan perencanaan kegiatan secara sistematis dan terukur sesuai dengan situasi perkembangan khususnya kondisi pandemi. Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan I dan upaya yang akan dilakukan di triwulan mendatang maka target kinerja tahun 2022 diproyeksikan dapat tercapai.

**Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I**

**Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan**

No	Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Output Tw I	% Capaian Output
1	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	5.000.000.000	1.915.330.876	2 Paket Rekomendasi Kebijakan	38,31

**Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi Pengembangan Peternakan dan Perikanan**

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan ( dapat berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1	Rapat Pembahasan Capaian Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran TW I	Terlaksana	Rapat internal Keasdepan pembahasan dilakukan secara periodik setiap akhir bulan

**Kendala Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:  
Kondisi Pandemi yang masih belum pulih menyebabkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output kegiatan dan serapan anggaran sedikit terhambat.

**Rekomendasi Pencapaian Target**

Adapun rekomendasi dalam mencapai target kinerja ke depan, sebagai berikut:

	<p>Penyempurnaan perencanaan kegiatan secara sistematis dan terukur sesuai dengan situasi perkembangan khususnya kondisi pandemi</p>
--	--